

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Jamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad, Nadir. 2009. *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press. Malang.
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alwi, hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, , 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka, Semarang.
- 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung

- Bernard, dkk., 2010, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bernard L.Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Brian Z Tamahana, 1997, *Realistic Socio-Legal Theory Pragmatism and a Social Theory of Law*, Oxford University Press, New York.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta,
- Cavendish, 1997, *Law Cards Jurisprudence*, Cavendish Publishing Limited, The Glass House, Warthon Strees London.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya, Jakarta.
- Darmastuti, Ari dan Tabah Maryana. 2004. *Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia*. Universitas Lampung. Lampung.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan AE. Priyono, LP3ES, Jakarta.
- Dahlan Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta.
- Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Duanne R. Monette Thomas & J. Sullivan Cornell R. DeJoms, 1989, *Applied Social Research*, (Chicago San Fransisco : Hlmt Reinhart and Winston Inc.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Didik Sukriono, 2009, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum*, dalam Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1, Juni, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta.

- Emertus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, di terjemahkan oleh Ahli Prof. Dr. Lili Rasyidi, SH, S.Sos, LLM, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Fred N. Kerlinger, 1996, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, terj. Ladung R. Simatupang, Cet. kelima, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Firmanzah, 2010, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik Pemilu 2009, Ed.1*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Henry Campbell Black, 2004, *Black Law Dictionary 8th*, US Gov, London.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , M Ali Safaat, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Joko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Hatapan, Jakarta.
- John Rawls, 1976, *A Theory of Justice*, Cambridge MA, Seven Printing, The Belnap Press of Harvard University Press.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Mahrus Ali (Editor), 2005, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- 2009, *Menggugat Dominasi Hukum Negara, Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura*, Yogyakarta: Rangkang-Indonesia. Yogyakarta.

----- 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung.

Maria S.W.Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.

K. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

M. van Bemmelen. 1986, *Khusus Delik-Delik Khusus*. Bina Cipta, Bandung.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.

-----2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi, Aksara, Cetakan ke-17. Jakarta.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.

Tjahjo Kumolo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*: PT. Mizan Publika. Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, Lampung.

Pradhanawati. 2005. *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Rajawali. Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- ,1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- 1997,*Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armiko
- 1983,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Purwaning M. Yanuar, 2007,*Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumi, Bandung.
- Pito, A.E dan Kemal F, 2007, *Mengenal Teori Politik, dari sistem Politik sampai Korupsi*, PT.Nuasa, Bandung.
- Rahman, Arifin, 2002, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC.Surabaya.
- R. Soeroso, 2010,*Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rizkiyansyah, 2007, *Mengenal Pemilu dalam menatap demokrasi*, IDEA Publishing, Bandung.
- Roeslan Salih, 1987,*Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1987,*Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Syamsuddin Haris. 2006. *Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada*. Pustaka Jaya, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Soedarsono 2005, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta.

- Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat pembangunan*, Angkasa, Bandung.
- , 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Cetakan ke-dua, Alumni, Bandung.
- , 2008, *Biarkan Hukum Mengalir*, Cet-2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, Cetakan ketujuh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional, Surabaya.
- Surbakti, E.B. 2009 *Kenalilah Anak Remaja Anda*. : PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1988, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 9
- Suratman Dkk, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum* hal 122, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusataka. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo, Jakarta.

- Soenarto Soerodibroto, 2004, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Media Perkasa, Yogyakarta.
- Slamet Siswanta, 2007, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tirtaatmidjaja, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta.
- Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, Bandar Lampung.
- Tunku Sofiah Jeewa, 2003, *Malaysian Election Laws* Facifika, Kualampur.
- W. Friedmam, 1967, *Legal Theory*, New York : Columbia University Press.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta.
- , 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

B. Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang penetapan perubahan peraturan pemerintah dalam hal pemilihan Gubernur, Walikota/Bupati

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu

C. Jurnal, Publikasi, Ensiklopedia, Media Massa

Seminar Mengkaji Keuangan Partai Politik, Mencari Gagasan Alternatif, Kampus Universitas Airlangga, Hasto Kristianto (Wasekjen PDIP).

Artidjo Alkostar, 2010, Ketua Muda Pidana MA-RI, Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime.

Abdul Fickar Hadjar, Dosen Ilmu Hukum Universitas Trisakti, saat membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Partisipasi Masyarakat dan Kampanye.

Bawaslu RI, Laporan Akhir Bawaslu RI untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014, 2015.

Bobby Briando, 2017, *Prophetical Law : Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian*, Jurnal: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

Budimansyah, 2017, *Rekonstruksi dari Penegakan Undang-undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan yang Substantif*, journal article, Jurnal Hukum Media Bhakti.

Brian Z. Tamahana menulis, 1997, " *There are a number of " legal ideologies". These include the elite production called doctrine and everyday understandings about law. Hence we speak of legal ideology, we mean views held in society about the nature and function of law*, Oxford University Press, New York.

Esmi Warassih, *Penelitian Socio-Legal; Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, Tulisan Ilmiah yang tidak dipublikasikan.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksananya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, 1994, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal.9, Dalam Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Ed.1 Cet.2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Laureen Snider, "Towards Safer Societies: Punishment, Masculinities and Violence against Women," *British Journal Criminology*,

(<https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/38/1/1/444712/TOWARDS-SAFER-SOCIETIESPunishment-Masculinities?redirectedFrom=PDF>), diakses Rabu, 5 Maret 2020 .

M.Ali Zaidan, *Norma, Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional —Veteranl Jakarta Jurnal Yuridis Vol. 1.No.1, Juni 2014 : 107 –124 ISSN 16934458.

J. Johansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesain Blanc, Bekasi Timur*.

Robert K. Yin, 1993, *Application of Case Study Research*, (New Delhi : Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park.

Saldi Isra, Sengkarut Sengketa Verifikasi, <http://www.saldiisra.web.id/index.php>, diakses tanggal 10 Januari 2014

Suhariyono AR, 2009, (Naskah masuk: 9 Nopember 2009, Revisi: 10 Nopember 2009, Revisi Terakhir: 14 Desember 2009,

Sudijono Sastro Atmomojo, dalam Mahrus Ali, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 14 Nomor 2, Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.

Turiman, “Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia) dalam <http://eprint.undip.ac.id>. Diakses pada hari Senin, 14 Oktober 2019 jam 02.00 Wib.

Tengku Erwinsyahbana, *Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Disampaikan pada Rapat Kerja Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Berastagi, 6-8 November 2015.

Topo Santoso, *kewenangan Elektorial Management dalam menangani Tindak Pidana Pemilu*, volume Nomor 6 Juli 2009.

-----, 2004, *Pengaturan Tindak Pidana Pemilu di Empat Negara Asia Tenggara*, Makalah.

-----, 2009, *Kewenangan Electoral Management Bodies dalam menangani Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Internasional,

Topo Santoso, 2009, *Pengaturan Tindak Pidana di Empat Negara Asia Tenggara*.

Pusat Bahasa ,2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yusuf, A. W. 2015. *Hukum dan Keadilan*. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1)

Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya

D. Internet

KPU Tolak Putusan Bawaslu Terkait PKPI, <http://m.republika.co.id>, diakses tanggal 11 Oktober 2019 Lihat juga “*KPU tolak Putusan Bawaslu Loloskan PKPI*”, <http://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 11 Oktober 2019.

Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem Hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 21 Maret 2018, jam 21.00 wib., available from <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, cited at 21 Maret 2018, diakses tanggal 21 Maret 2018. <http://orintononline.blogspot.com/2018/03/perdebatan-teori-hukum-friedman.html>, diakses tanggal 21 Maret 2018.

Prasko, Pengertian tindak pidana, <http://prasko19.blogspot.co.id/2019/02/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, waktu pengunduhan 2 februari 2019 pukul 14:52 WIB.

Richard Qiuney, *The Social Reality of Crime*, (Boston : Little Brown and Company, 1970), halaman 15. Terjemahan bebas penulis kejahatan adalah sebuah definisi perilaku manusia yang diciptakan (maksudnya dirumuskan) oleh agen yang memiliki wewenang dalam masyarakat yang teorganisir secara politis (maksudnya adalah pemerintah).

<https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> akses tanggal 13 November 2019.

[http://kpu.go.id/sejarah-kpu-indonesia/akses 30 Desember 2019.pukul 20:30 wita](http://kpu.go.id/sejarah-kpu-indonesia/akses%2030%20Desember%202019.pukul%2020:30%20wita)

[http://sultra.kpu.go.id/sejarah-kpu/akses 30 Desember 2019,pukul 20:30 wita](http://sultra.kpu.go.id/sejarah-kpu/akses%2030%20Desember%202019.pukul%2020:30%20wita)

<https://aceh.tribunnews.com/2018/09/05/larangan-dan-sanksi-hukum-pemilu-2019>,
akses 5 Januari 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbc2fd878fff/ada-subjek-hukum-yang-dapat-lolos-dari-jerat-uu-pemilu/2019>, akses 7 Maret 2020.

<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Pengantar-Ilmu-Hukum-Makalah-1.pdf>,
akses 10 Maret 2020, pukul 17:30 W